

# POS EKONOMI DIGITAL SEBAGAI REGULASI PENINGKATAN SERAPAN TENAGA KERJA UMKM DI DI DESA PRAGAAN DAYA KEC. PRAGAAN KAB. SUMENEP

**Abrori, S.Ag., M.M.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Konservatori Musik Indonesia, [abrori.kaderpkb@gmail.com](mailto:abrori.kaderpkb@gmail.com)

## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi cukup besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Peningkatan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan nasional harus terus diupayakan. UMKM berperan penting dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data kementerian koperasi dan UMKM, UMKM telah mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia, serta kontribusi UMKM pada PDB mencapai 61,07% pada 2020. Sebagai penopang perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah sudah seharusnya diberdayakan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat menjadi solusi ketimpangan ekonomi.

Kondisi di desa Pragaan Daya yang merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep, UMKM yang bergerak di berbagai produk senantiasa mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi di beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, pada tahun 2020-2021 jumlah UMKM di desa Pragaan Daya mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada terbatasnya kegiatan UMKM.

**Kata kunci:** ekonomi digital, serapan tenaga kerja, UMKM

## ABSTRACT

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a significant contribution in improving the Indonesian economy. Increasing the contribution of MSMEs to national growth must continue to be pursued. MSMEs play an important role in the expansion of job opportunities and employment, as well as the growth of gross domestic product (GDP). Based on data from the ministry of cooperatives and MSMEs, MSMEs have been able to absorb around 97% of the workforce in Indonesia, and the contribution of MSMEs to GDP reaches 61.07% in 2020. As a supporter of the economy, micro, small and medium enterprises should be empowered to improve the quality of growth economy and is expected to be a solution to economic inequality. Conditions in Pragaan Daya village, which is part of Sumenep Regency, MSMEs engaged in various products have always recorded quite high growth in the last few years. However, in 2020-2021 the number of MSMEs in Pragaan Daya village has decreased due to the impact of the Covid-19 pandemic and the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which have an impact on the limited activities of MSMEs.*

**Keywords:** digital economy, labor absorption, MSME

## PENDAHULUAN

Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga lebih besar dibandingkan dengan usaha besar dimana tenaga kerja menjadi salah satu elemen dari fungsi produksi yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan secara khusus. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan UMKM akan meningkatkan daya beli masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di desa Pragaan Daya.

Dalam pembangunan ekonomi, UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memegang peranan penting karena sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil di sektor tradisional maupun modern, dan UMKM juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan UMKM tersebut adalah prioritas dari setiap perencanaan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu kementerian perindustrian dan perdagangan, serta kementerian koperasi dan UKM.

Saat ini, dunia sedang menghadapi era society 5.0. UMKM seolah dituntut untuk mengembangkan daya saing melalui platform digital. Ekonomi global yang semakin maju serta didukung dengan adanya teknologi yang semakin mutakhir tersebut membuat terciptanya perekonomian digital yang kian berkembang pesat di dunia. Segala hal memungkinkan dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dengan perangkat *gadget/smartphone* semuanya telah berubah.

Pemerintah juga telah menambah

alokasi anggaran khusus bagi UMKM menjadi Rp96,21 Triliun dengan rincian program berupa Subsidi Bunga, Penempatan Dana

Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Tercatat sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM Tahun 2021 sebesar Rp64,35 Triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 33,93 juta. Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

Dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pos ekonomi digital sebagai regulasi peningkatan serapan tenaga kerja UMKM di di desa Pragaan daya.

## KAJIAN LITERATUR

Definisi ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang mengandalkan bantuan internet dan atau *Artificial Intelligence (AI)*. Dengan adanya ekonomi jenis ini, orang dapat menghasilkan uang dengan mudah dan fleksibel.

Don Tapscott menyebutkan pengertian ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang berdasar pada teknologi digital internet. Sebutan lain dari ekonomi digital adalah *internet economy, web economy, digital-based economy, new economy knowledge*, atau *new economy*.

Dilansir Wikipedia, ekonomi

digital mengacu pada ekonomi yang didasarkan pada teknologi komputasi digital, meskipun kita semakin menganggap ini sebagai menjalankan bisnis melalui pasar berbasis internet dan *World Wide Web*.

Dari berbagai pengertian ekonomi digital di atas dapat disimpulkan bahwasanya ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrument informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi.

#### **Peningkatan Potensi Ekonomi Digital untuk Mendukung UMKM**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM, saat ini mencapai 64,2 juta dan pada tahun 2020 telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 60,51% atau senilai Rp9.580 Triliun dengan kemampuan menyerap 96,92% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.

Pemerintah juga telah menambah alokasi anggaran khusus bagi UMKM menjadi Rp96,21 Triliun dengan rincian program berupa Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung, dan insentif PPH

Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Tercatat sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM Tahun 2021 sebesar Rp64,35 Triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 33,93 juta. Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

“Program Kartu Prakerja juga turut membantu para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Berdasarkan data Manajemen Pelaksana, salah satu pelatihan yang paling diminati adalah mengenai penjualan dan pemasaran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan *keynote speech* dalam Webinar Obsession Media Group UMKM Summit 2021 dengan tema “PPKM Outlook 2022, Pasca - PPKM dan Peluang 2022”, dari Jakarta Pusat, Sabtu (06/11/2021).

Pada sisi lain, Kemenko Perekonomian juga terus mendorong peningkatan kualitas program Kartu Prakerja dan mengembangkan ekosistem Prakerja yang dalam aktualisasinya melibatkan pihak swasta termasuk perbankan dan perusahaan layanan keuangan digital sebagai mitra pembayaran.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas penerima Kartu Prakerja mengatakan bahwa pelatihan Kartu Prakerja telah mendorong kewirausahaan dan insentif Kartu Prakerja digunakan untuk modal usaha. Bahkan 17% penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur telah berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa Kartu

Prakerja telah efektif meningkatkan keterampilan menjadi wirausaha.

Selain itu, perbankan juga telah turut serta memberikan dukungan dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini, diantaranya dengan memberikan dukungan program restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dapat dinikmati oleh dunia usaha termasuk UMKM.

Berbagai studi menyatakan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini didukung oleh sejumlah faktor, diantaranya yakni total penduduk yang terbesar ke-4 di dunia, dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 191 juta atau 70,7%.

Dari sisi digital user, jumlah pengguna ponsel Indonesia saat ini mencapai 345,3 juta atau 125,6% dari populasi dengan penetrasi internet sebesar 73,7% dan trafik internet yang mengalami peningkatan 15-20%.

“Guna mengoptimalkan potensi ekonomi digital yang kita miliki, diperlukan orkestrasi berbagai inisiatif dan kebijakan melalui penyiapan framework terkait pengembangan ekonomi digital,” pungkas Menko Airlangga.

Dengan berbagai potensi yang ada, diharapkan melalui upaya pengembangan ekonomi digital dapat diciptakan banyak terobosan dan inovasi yang mampu menjangkau dan melibatkan semua sektor dan pelaku/penggerak perekonomian nasional, termasuk UMKM. (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/37966/peningkatan-potensi-ekonomi-digital-untuk-mendukung-umkm/0/berita>)

### **Transformasi Digital UMKM Jadi Prioritas Penguatan Fondasi**

### **Ekonomi**

Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM.

Peran UMKM sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di negara ini atau sekitar 119,6 juta orang. Meski demikian, baru sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan *e-commerce*.

Dengan menggunakan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan bisnisnya, UMKM bisa memperoleh sejumlah manfaat, antara lain akan mampu menjangkau basis konsumen yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, memudahkan monitoring aktivitas usaha, serta menurunkan biaya, khususnya biaya pemasaran, logistik, dan pengiriman.

Dalam hasil survei dari OVO dan CORE Indonesia tahun 2021 disebutkan bahwa 84% mitra UMKM merasa terbantu oleh adanya fasilitas pembayaran digital atau *e-wallet* selama pandemi. Bahkan 70% di antaranya mengalami peningkatan pendapatan harian sejak memanfaatkan layanan keuangan digital, 68% memperoleh akses layanan keuangan yang lebih luas, 71% melakukan pencatatan transaksi penjualan yang lebih teratur, dan 51 %

mengaku lebih memahami penggunaan teknologi untuk mempertahankan usahanya. Dengan demikian, digitalisasi telah menunjang program peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM. Pemerintah bersama *stakeholders* terkait terus mendorong penguatan fondasi ekonomi nasional dengan menetapkan agenda transformasi digital UMKM sebagai salah satu prioritas. Beberapa program yang dijalankan antara lain adalah Akselerasi Pengembangan Wirausaha, Transformasi digital Koperasi dan UMKM, serta Penguatan Ekosistem Digital.

Melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, Pemerintah juga telah menetapkan beberapa target untuk pengembangan UMKM nasional ke depannya, seperti 24 juta UMKM harus *on boarding* di 2023 dan 30 juta di 2024, kemudian membentuk 500 unit koperasi modern berbasis digital di 2024, serta meningkatkan kontribusi ekspor UMKM hingga 17% pada 2024. Adapun dari sisi pembiayaan UMKM, beberapa kebijakan yang dilaksanakan meliputi peningkatan porsi kredit UMKM sebesar 20% di 2022 dan dinaikkan secara bertahap menjadi 30% di 2024.  *Holding* BUMN juga dibentuk untuk pembiayaan ultra mikro, penyediaan skema KUR Super Mikro, integrasi program Kartu Prakerja dengan KUR, KUR bagi korporatisasi petani dan nelayan, serta yang tak kalah penting adalah melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR.

Untuk mendukung pengembangan program KUR, Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR di tahun

2022 menjadi sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30% dari tahun lalu, serta mensubsidi bunga KUR sehingga bunga KUR menjadi hanya sebesar 3% sampai dengan Desember 2022. “Hal ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau,” imbuh Menko Airlangga.

Selanjutnya, terdapat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan prioritas pengadaan barang dan jasa dalam *e-katalog* LKPP, dengan target 1 juta UMKM *on boarding* di 2022, serta arahan Presiden terkait target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN sebesar Rp400 triliun di tahun ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teknik analisis isi dan studi pustaka. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama (Gunawan, 2013).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis

penelitian deskriptif yang merupakan salah satu jenis dalam penelitian kualitatif. Monique Hennink, Inge Hutter dan Ajay Bailey mengatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu sebuah pendekatan yang memungkinkan kita meneliti pengalaman orang secara mendalam dengan menggunakan seperangkat metode penelitian yang spesifik, misalnya wawancara, observasi, analisis data, sejarah hidup atau biografi (Bakri, 2016).

### **Sumber Data.**

Di dalam penelitian, data tidak muncul dengan sendirinya melainkan diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menyediakan data penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh. Adapun jenis- jenis data sebagai berikut: (Muharto & Ambarita, 2016)

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh data primer ini, penulis secara langsung observasi dan mengadakan wawancara dengan pemilik dan tenaga kerja UMKM di Desa Pragaan Daya.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber yang pertama. Untuk memperoleh data sekunder ini, penelitimujuk pada pada buku- buku serta jurnal yang berkaitan dengan masalah sistem pengupahan tenaga kerja dalam perspektif upah dalam ekonomi Islam.

### **Prosedur Pengumpulan Data.**

Prosedur pengumpulan data merupakan suatu hal yang paling penting dalam penelitian, karena ini merupakan strategi atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan- kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya (Sundaryono, 2016).

Dalam upaya menghasilkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang akan diperoleh oleh penulis, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui: Observasi non Partisipan, Wawancara semi terstruktur, dan Dokumentasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

pos ekonomi digital sebagai regulasi peningkatan serapan tenaga kerja UMKM di di desa Pragaan daya menjadi indikator penting pasca Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya UMKM, karena kedua sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu ada strategi khusus dalam pemulihan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi dunia akibat pandemi, strategi pemulihan ekonomi di sektor UMKM.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang

berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2020, jumlah UMKM seluruh Indonesia sebanyak 65,47 juta unit dan memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.574 triliun.

UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari total tenaga kerja di dunia usaha serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. UMKM juga memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008, dunia usaha di Indonesia terbagi dalam berbagai jenis yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang berdomisili dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kebijakan melakukan pemberdayaan dan pengembangan dunia usaha agar dapat tumbuh dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat, terutama sektor UMKM yang memiliki jumlah paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja.

Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19 ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu sasaran program PEN yaitu menggerakkan UMKM. Dikutip dari [anggaran.kemenkeu.go.id](http://anggaran.kemenkeu.go.id), pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp455,6 triliun yang terbagi dalam 3

klaster program yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi. Dari ketiga program itu, penguatan ekonomi memiliki pos anggaran terbesar yakni Rp178,3 triliun yang sebagian peruntukannya untuk dukungan UMKM, disusul penanganan kesehatan sebesar Rp122,5 triliun, dan perlindungan sosial sebesar Rp154,8 triliun.

Tahun 2022 UMKM diarahkan untuk mempercepat pemulihan dan penyerapan tenaga kerja, mitigasi dampak *scarring effect* dari pandemi, serta menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif. Kinerja tersebut akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan agenda prioritas *finance track* yang dibahas dalam pertemuan Presidensi G20 Indonesia.

Salah satu strategi UMKM dalam menjaga kontinuitas bisnisnya dalam kondisi Covid-19 adalah dengan menjadi lebih fleksibel dan lebih kolaboratif (*Indonesian Treasury Review* Vol.7, No.1, (2022), Hal 33-47). Ketahanan bisnis sebuah usaha tecermin dalam kemampuan unit usaha tersebut dalam menyelesaikan masalah dan kegigihan dalam melewati masa-masa sulit, terlepas dari kondisi sulit apa pun, apakah itu krisis atau pandemi. Resiliensi (kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan) bisnis dapat ditingkatkan oleh UMKM melalui pengembangan fleksibilitas bisnis dan kapabilitas kolaborasi secara bersamaan.

UMKM tentunya tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan dari pemerintah untuk tetap menggerakkan kegiatan perekonomian yang melibatkan UMKM. Kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan UMKM yang merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM selama ini, baik dalam kondisi normal maupun kondisi luar biasa seperti pandemi Covid-19. Berbagai permasalahan struktural UMKM yang juga perlu diselesaikan adalah terkait kualitas dan kontinuitas produksi, akses pemasaran, *branding* dan *packaging* produk, kualitas SDM/pelaku UMKM di bidang manajerial, keuangan dan produksi.

## PENUTUP

Indikator penting pasca Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya UMKM. karena kedua sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu ada strategi khusus dalam pemulihan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi dunia akibat pandemi, strategi pemulihan ekonomi di sektor UMKM .

Perhatian pemerintah desa terhadap UMKM ternyata tidak berhenti pada penyediaan dana untuk UMKM. Pengembangan fleksibilitas bisnis UMKM juga menjadi perhatian pemerintah. Salah satu perhatian pemerintah adalah membuat UMKM naik kelas, misalnya *go digital*. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sudah terbiasa melakukan belanja *online* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak UMKM yang bergabung dengan *marketplace* seperti Shopee,

jd.id, Tokopedia, atau Bukalapak agar bertahan di saat pandemi.

## REFERENSI

- Angga, B. (2020). *Ekonomi Digital dan Ketimpangan Literai Teknologi*. Dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-4859789/ekonomi-digital-dan-ketimpanganliterasi-teknologi>. Diakses pada tanggal 01 Februari 2020.
- Anjungroso, F. (2019). *Pentingnya UMKM Punya Pembukaan, Accurate Kampanyekan Program Kapan Naik Kelas*. Dikutip dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/11/05/pentingnya-umkm-punyapembukaan-accurate-kampanyekan-program-kapan-naik-kelas>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2020.
- Aribawa, D. (2016). *Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah*. Jurnal Siasat Bisnis (JSB), ISSN 0853-7666.
- Basry, A. (2018). *Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada UMKM*. Jurnal Komputer dan Informatika, 2(3) 2018.
- Djatikusumo, K.N. (2016). *Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Komputer terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus di UMKM Kota Malang)*. Industrial Research, Workshop and National Seminar Politeknik Negeri Bandung, hal.28-29.
- Farras, B. (2019). *UMKM Kalah Saing, Jokowi Beberkan Masalahnya*. Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190111134416-4-50214/umkm-kalahsaing-jokowi-beberkan-masalahnya>. Diakses pada tanggal 01 Februari 2020.

- Febriyanti, Z.E. (2019). *Menakar Peran Akuntansi bagi UMKM*. Dikutip dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/244992/menakar-peran-akuntansibagi-umkm>. Diakses pada tanggal 01 Februari 2020.
- Fitranaarda, D.M. (2020). *SDM dan Modal jadi batu sandungan UMKM di Indonesia*. Dikutip dari <https://www.idntimes.com/business/economy/daffa-maududyfitranaarda/sdm-dan-modal-jadi-batu-sandungan-umkm-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2020.